



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i6>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Miskin (Studi Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso)

Nuraisyah<sup>1\*</sup>, Andi Febri Herawati<sup>2</sup>, Donal Adrian<sup>3</sup>, Achsan Sule<sup>4</sup>, Safruddin<sup>5</sup>, Muh. Raffy Akbar<sup>6</sup>, I Putu Agus Eka Jaya Mahardika<sup>7</sup>, Najhwa Syfa<sup>8</sup>

<sup>1</sup>Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah, Indonesia, [nuraisyaambo@gmail.com](mailto:nuraisyaambo@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah, Indonesia, [Herawati.febi18@gmail.com](mailto:Herawati.febi18@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah, Indonesia, [Donal.adrian2014@gmail.com](mailto:Donal.adrian2014@gmail.com)

<sup>4</sup>Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah, Indonesia

<sup>5</sup>Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah, Indonesia

<sup>6</sup>Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah, Indonesia

<sup>7</sup>Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah, Indonesia

<sup>8</sup>Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah, Indonesia

\*Corresponding Author: [nuraisyaambo@gmail.com](mailto:nuraisyaambo@gmail.com)

**Abstract:** *The policy problem of the Poor Women's Empowerment Program, which is not followed by sustainable coaching and mentoring, causes the low income of poor women in Sigi and Poso districts. This study aims to obtain an overview of how the gender-responsive CERDP program empowers poor women. This research was conducted through a qualitative approach. Data was obtained through observation and in-depth interviews with key informants. Then the validity, reliability of the data after going through the triangulation process, clarified, described, explained and verified with policy theories to formulate research answers. The results show that community social capital is a factor that determines the success of LSPBM. Lack of understanding of gender equality is an inhibiting factor in empowering women. This makes it difficult for poor women's economies to develop. CERDP policy does not only depend on four elements (ideal policy, implementing organization, target group, and environment), but also pays attention to communication factors as a determinant of successful policy implementation.*

**Keyword:** *Policy, Empowerment, Poor Women*

**Abstrak:** Masalah Kebijakan Program Pemberdayaan Perempuan Miskin yang tidak diikuti dengan pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan menyebabkan masih rendahnya pendapatan perempuan miskin di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran bagaimana Program PMPD yang responsif gender memberdayakan perempuan miskin. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam kepada informan kunci. Kemudian validitas, realibilitas data itu setelah melalui proses triangulasi, diklarifikasi, dideskripsi, dieksplanasi dan diverifikasi dengan teori-teori kebijakan untuk merumuskan jawaban penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial masyarakat merupakan

faktor yang menentukan keberhasilan LSPBM. Kurangnya pemahaman kesetaraan gender merupakan faktor penghambat dalam memberdayakan perempuan. Hal ini mengakibatkan perekonomian perempuan miskin sulit berkembang. Kebijakan program PMPD tidak hanya bergantung pada empat unsur (kebijakan yang ideal, organisasi pelaksana, kelompok sasaran, dan lingkungan), akan tetapi juga memperhatikan faktor komunikasi sebagai penentu keberhasilan implementasi kebijakan.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Pemberdayaan, Perempuan Miskin

## PENDAHULUAN

Fenomena kemiskinan merupakan realitas sosial yang ada di masyarakat dan sekaligus sebagai masalah pembangunan yang hampir dihadapi semua negara berkembang termasuk Indonesia. Situasi kemiskinan yang melanda Indonesia telah membuat perempuan Indonesia menerima beban ganda, beban tersebut berkenaan dengan perlakuan terhadap peran produktif, reproduktif dan peran sosialnya. Kemiskinan juga telah memaksa perempuan harus bisa melaksanakan peran produktifnya agar bisa membantu keluarga dalam mengatasi kesulitan ekonominya. Namun tak jarang dalam pelaksanaan perannya tersebut, ia mengalami banyak masalah, baik yang berkaitan dengan posisi gendernya yang diperlakukan tidak adil, maupun kondisi dirinya yang penuh dengan serba kekurangan.

Kesenjangan gender ini umumnya dianggap sebagai akibat dari besarnya beban ganda yang harus ditanggung perempuan. Kesenjangan gender terjadi begitu luas dalam hal akses terhadap kendali atas sumber daya, dalam kesempatan ekonomi, dalam kekuasaan, dan dalam hak bersuara politik (World Bank, 2005). Perempuan sebagai individu mempunyai harapan, kebutuhan, minat dan potensinya sendiri. Perempuan juga memerlukan aktualisme diri yang seoptimal mungkin untuk pengembangan dirinya yang akan berdampak positif bagi pengembangan sumberdaya pembangunan secara umum. Aktualisasi perempuan ini hanya dapat terjadi dalam situasi, kondisi lingkungan masyarakat yang kondusif, yang memungkinkan hal tersebut dapat terjadi. Kenyataannya meskipun iklim yang berkembang mulai memberikan peluang, namun banyak aspek yang berkaitan dengan faktor-faktor kultural dan sosial yang masih menghambat pengembangan keberdayaan perempuan. Birdshall dan Mc Greevey (1983) menemukan fakta bahwa beban perempuan miskin lebih besar karena peran ganda mereka sebagai orang yang harus mengurus rumah tangga dan sebagai pencari nafkah untuk keluarga.

Secara sosial budaya, kemiskinan membuat para wanita miskin lebih dikorbankan. Akses perempuan untuk memperoleh pekerjaan sangat dibatasi hegemoni nilai. Masih banyak nilai-nilai sosial budaya di masyarakat Indonesia yang memberikan batasan-batasan pada kaum perempuan. Kondisi seperti ini seringkali membuat pemilik usaha lebih memilih pekerja laki-laki daripada perempuan. Padahal, kondisi kebutuhan ekonomi memaksa kaum perempuan untuk bekerja di luar rumah. Perempuan sebagai makhluk "lemah" dalam kemiskinan merupakan kelompok resiko tinggi menjadi korban perdagangan manusia, yang dijerumuskan menjadi pekerja seksual, tenaga kerja *illegal* di luar negeri, atau perbudakan baru, yaitu bekerja dengan bayaran yang sangat rendah. Gambaran itu adalah realita yang banyak terjadi di Indonesia. Perempuan miskin terbatas untuk memilih pekerjaan. Mengingat sebagian besar perempuan miskin berada di perdesaan yang mana curahan kerja perempuan di perdesaan seringkali lebih tinggi namun terbatas pada kerja reproduktif yang tidak dinilai secara ekonomi, sehingga penghargaan atas perempuan hampir tidak ada. Perdesaan pada umumnya lebih tertinggal pembangunannya daripada daerah perkotaan, seperti misalnya infrastruktur fisik dan rendahnya kualitas pendidikan dan fasilitas kesehatan.

Bertolak dari masalah kemiskinan dan masalah yang dialami perempuan miskin perdesaan, maka pemerintah mengambil langkah strategik dengan membuat kebijakan pengentasan kemiskinan yang dituangkan pada program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang responsif gender. Memperkuat dan memberdayakan perempuan berarti mengorganisir perempuan agar mampu meningkatkan kesejahteraan dengan memenuhi kebutuhan dasar termasuk rasa aman, meningkatkan akses terhadap berbagai sumber yang ada, meningkatkan partisipasi perempuan pada setiap siklus dan kegiatan proyek dan pembangunan di wilayahnya, meningkatkan kesadaran kritis perempuan dan masyarakat luas akan haknya sebagai manusia dan warga negara, dan meningkatkan kontrol mereka terhadap diri mereka dan proses pengambilan keputusan, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat.

Kebijakan tentang pemberdayaan masyarakat secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004, dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, dan peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 menjadi pedoman bagi terbentuknya suatu program yang responsif gender. Melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Pemerintah mengatur penyelenggaraan pengarusutamaan gender mulai dari instansi atau lembaga pemerintahan di tingkat pusat sampai daerah. Program pembangunan yang responsif gender adalah semua kebijakan dan program yang memperhatikan secara konsisten dan sistematis akan perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat dan mengupayakan untuk menghilangkan hambatan-hambatan struktural dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berperspektif gender, yaitu dengan meluncurkan Proyek Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD) atau *Community Empowerment for Rural Development Project* (CERD) yang arahnya untuk pengentasan kemiskinan pada masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertumbuhan melalui pembangunan infrastruktur dan usaha ekonomi dalam kerangka keterkaitan desa dan kota. PMPD adalah proyek untuk memberdayakan masyarakat desa (perempuan dan laki-laki) sehingga memiliki daya dan upaya untuk mengelola pembangunan di desa secara mandiri, berkesinambungan dan bebas dari kemiskinan. Tujuan dari proyek PMPD adalah : (1) memberdayakan masyarakat desa dengan cara memperkuat kapasitas mereka merencanakan dan mengelola kegiatan pembangunan mereka sendiri, dan (2) mendukung investasi dan membantu pengembangan (jalan) perdesaan-perkotaan dengan membangun prasarana perdesaan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kegiatan usaha di luar pertanian.

Desa Kalawara adalah salah satu lokasi proyek PMPD yang berada di Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah yang proyek PMPD melalui komponen B: pengembangan lembaga keuangan pedesaan, berupa Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSPBM). Kegiatan ini bertujuan mengembangkan ekonomi produktif masyarakat. Diharapkan dengan adanya program dari PMPD di Desa Kalawara Kecamatan Pakuli Kabupaten Sigi dan Desa Mapane serta Desa Tokorondo Kecamatan Poso Pesisir . Tujuannya agar dapat mewujudkan masyarakat pedesaan yang memiliki daya dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas sosial ekonomi secara mandiri dan berkesinambungan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi program PMPD belum sepenuhnya mampu memberdayakan perempuan miskin di Lokasi Penelitian.

## METODE

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan metode deskriptif, yakni memberikan gambaran dari berbagai gejala yang ditemui dilapangan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk menjelaskan berbagai fenomena yang berkaitan dengan objek penelitian tentang pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dengan integrasi perspektif sensitif gender. Pendekatan bersperspektif gender, fokusnya pada hubungan yang timpang antara laki-laki dengan perempuan. Dengan demikian, melalui pendekatan gender ada upaya untuk meningkatkan posisi sosial politik-ekonomi-budaya perempuan yang timpang tersebut sehingga tercapai kesetaraan dan keadilan gender

Data pokok dalam penelitian ini berasal dari perempuan miskin di Lokasi Penelitian yang dianggap representatif, anggota dan pengurus perempuan LSPBM Tomporoso, LSBM Sinar Jaya dan LSBM Makmur, Tokoh Masyarakat Desa Kalawara, Tokoh Desa Mapane dan Tokoh Desa Tokorondo, implementor program PMPD tingkat provinsi sampai dengan pelaksana program PMPD di tingkat desa.

Data Sekunder ialah data yang diharapkan dapat melengkapi data hasil penelitian, yang terdiri atas pelbagai dokumen, kepustakaan acuan, laporan penelitian, dan karya-karya ilmiah atau artikel yang dipublikasikan secara meluas. Selain itu juga dokumen berupa arsip Lokasi Penelitian, arsip LSPBM dari pelaksanaan Program PMPD mulai dari tingkat Propinsi sampai dengan tingkat Desa berupa pedoman umum pelaksanaan program PMPD, laporan bulanan dari komponen B: LSPBM, data statistik, dan arsip dari instansi atau badan yang memiliki kewenangan dalam mengelola LSPBM.

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode Triangulasi, yakni mengadakan kroscek berbagai data dan informasi yang diperoleh dari informan, kemudian dianalisa dengan teori dan konsep *capacity building* dari Grindle dan diinterpretasikan sehingga mempunyai makna yang dapat menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan objek penelitian tentang Implementasi Kebijakan pemberdayaan perempuan miskin (Studi Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa merupakan suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa dan mengadakan pemerintahan sendiri (Yulianti, ayuk dan Poernomo 2003). Perdesaan di Indonesia identik dengan kemiskinan, dan mengingat sebagian penduduk Indonesia berada di perdesaan maka menjadi penting untuk memusatkan pembangunan perdesaan, khususnya upaya penanggulangan kemiskinan menuju pemberdayaan masyarakat.

Untuk mewujudkan hal itu pemerintah melalui kebijakan pengentasan kemiskinan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan desa. Desa Kalawara merupakan salah satu desa dari 6 desa yang ada di Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi dan Kelurahan Mapane adalah salah satu Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi lokasi pelaksanaan Proyek Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD), melalui Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSPBM). LSPBM sebagai lembaga keuangan pedesaan diharapkan menjadi sarana pemberdayaan sosial ekonomi swadaya, terutama bagi keluarga miskin dalam suatu komunitas desa.

Salah satu akar masalah kemiskinan di kawasan perdesaan adalah terdapatnya ketidakseimbangan hubungan dengan kawasan perkotaan yang cenderung merugikan perdesaan. Karena itu diperlukan suatu kebijakan pengentasan kemiskinan yang berpihak dalam upaya penguatan perdesaan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pendekatan tersebut, pemerintah meluncurkan Proyek Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (Proyek PMPD) atau *Community Empowerment for*

*Rural Development Project (CERD Project)* yang mulai dilaksanakan sejak Tahun Anggaran 2001.

Sasaran Proyek PMPD adalah: (1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kapasitas kelembagan masyarakat dalam pembangunan perdesaan; (2) Meningkatnya kapasitas aparat dalam memfasilitasi pembangunan perdesaan; (3) Menguatnya lembaga keuangan masyarakat perdesaan; (4) Meningkatnya kapasitas usaha skala kecil dan mikro perdesaan dalam kegiatan produksi, pengelolaan dan pemasaran; (5) Terbentuknya pusat informasi untuk mendukung pemasaran produk usaha skala kecil dan mikro perdesaan; (6) Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perdesaan untuk menunjang kegiatan ekonomi perdesaan; (7) Meningkatnya keterkaitan perdesaan-perkotaan; (8) Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan sosial ekonomi.

Proyek ini terdiri dari 4 komponen, yakni: **(1) Komponen A: Peningkatan Kapasitas untuk Pembangunan Masyarakat**, mencakup: *Pengembangan kelembagaan*, meliputi penguatan kelembagaan yang sudah ada dan pembentukan kelembagaan baru yang diperlukan untuk berjalannya mekanisme perencanaan berbasis masyarakat (*Community Based Planning Mechanism* atau CBPM) serta peningkatan kemampuan staf pemerintah dan masyarakat desa; *Pengembangan sumber daya manusia*, meliputi peningkatan kapasitas aparatur pemerintah melalui pelatihan dan pendidikan formal; *Penyediaan hibah (bantuan) desa*, diberikan kepada desa untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kapasitas masyarakat miskin perdesaan; **(2) Komponen B: Pengembangan Lembaga Keuangan dan Ekonomi Perdesaan**, mencakup: ***Pembentukan dan pengembangan Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSPBM)***, meliputi: (i) mobilisasi simpanan dari anggota dan pelayanan pinjaman kepada anggota; (ii) kegiatan pelatihan untuk meningkatkan sikap, pengetahuan dan keterampilan para pengelola dan anggota LSPBM; (iii) pembentukan dan pengembangan asosiasi LSPBM; (iv) peningkatan kerjasama antara LSPBM dan asosiasinya dengan lembaga keuangan formal serta lembaga pelayanan bantuan teknis; (v) dukungan penguatan modal bagi LSPBM dalam rangka menuju kemandirian dan keberlanjutan. ***Pengembangan usaha mikro dan kecil perdesaan***, meliputi: (i) kegiatan pelatihan serta bantuan teknis bagi pengusaha kecil dan mikro perdesaan; (ii) dukungan pemasaran produk usaha kecil dan mikro perdesaan; **(3) Komponen C: Peningkatan Prasarana Perdesaan**, komponen ini meliputi kegiatan peningkatan prasarana perdesaan yang dibutuhkan masyarakat miskin perdesaan, mencakup prasarana penghubung ke pusat pertumbuhan, prasarana pendukung usaha ekonomi perdesaan, dan prasarana permukiman dan; (4) **Komponen D: Manajemen dan Monitoring**, komponen kegiatan ini meliputi kegiatan dukungan administrasi, bantuan teknis, pemantuan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan proyek secara keseluruhan.

Untuk melihat idealnya kebijakan pengentasan kemiskinan yang dituangkan dalam program PMPD, dapat dilihat pada pelaksanaan programnya yang terdiri dari 4 komponen kegiatan: (1) **Komponen A: Peningkatan Kapasitas untuk Pembangunan Masyarakat**; (2) **Komponen B: Pengembangan Lembaga Keuangan Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSPBM)**; (3) **Komponen C: Peningkatan Prasarana perdesaan** dan ; (4) **Komponen D: Manajemen dan Monitoring**.

### **Peningkatan Kapasitas untuk Pembangunan Masyarakat**

Kegiatan komponen A meliputi: (1) *Pengembangan kelembagaan*, mencakup penguatan kelembagaan yang sudah ada dan pembentukan kelembagaan baru yang diperlukan untuk berjalannya mekanisme perencanaan berbasis masyarakat serta peningkatan kemampuan staf pemerintah dan desa; (2) *Pengembangan sumber daya manusia*, mencakup peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah melalui pelatihan dan pendidikan formal; (3). *Penyediaan hibah (bantuan) desa*, diberikan kepada desa untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kapasitas masyarakat miskin.

### **Pengembangan Lembaga Keuangan dan Ekonomi Perdesaan**

LSPBM di Lokasi Penelitian merupakan lembaga (perantara) keuangan berfungsi sebagai lembaga ekonomi dengan menghimpun, mengelola dan mengembangkan kekayaan milik bersama, yang berasal dari tabungan para anggota dan sumber-sumber lain yang sah, digunakan untuk pelayanan kepada anggota bagi pertumbuhan ekonomi keluarganya. Anggota LSPBM dengan budaya surplus, memiliki kesempatan yang luas untuk menabung, memupuk modal, melakukan investasi usaha guna meningkatkan pendapatan keluarga dan menghimpun kekayaan rumah tangga.

Untuk menumbuhkembangkan LSPBM di Lokasi Penelitian, maka langkah awal yang dilakukan adalah menyusun strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Strategi tersebut yaitu: (1) mendorong secara sistematis proses penyadaran diri secara individual dan kolektif, (2) mengembangkan organisasi dan kepemimpinan demokratis dalam kelompok sosial primer sebagai media saling belajar dan instrumen perubahan perilaku secara aman, (3) pendidikan manajemen ekonomi rumah tangga untuk mengembangkan sikap dan perilaku budaya surplus, (4) mendorong kegiatan produktif dan mobilisasi potensi sumber daya untuk peningkatan pendapatan keluarga, (5) memfasilitasi dan menjembatani akses pada sumber-sumber pelayanan pengembangan, (6) penyediaan bantuan teknik dan pendampingan sesuai kebutuhan, (7) memfasilitasi kerjasama antar kelompok dan integrasi dalam kehidupan sosial.

Dalam pelaksanaan strategi itu, baik pihak proyek, maupun pengurus tidak mengalami kendala yang berarti, pada pelaksanaannya semua elemen yang terkait bisa saling bekerja sama.

### **Peningkatan Prasarana Perdesaan**

Komponen ini meliputi kegiatan peningkatan prasarana perdesaan yang dibutuhkan masyarakat miskin perdesaan, mencakup prasarana penghubung ke pusat pertumbuhan, prasarana pendukung usaha ekonomi perdesaan dan prasarana permukiman.

Dari hasil pendampingan terhadap masyarakat melalui pengembangan kapasitas kelembagaan yang membentuk KKP- Dus telah menghasilkan usulan kegiatan pembangunan desa yang berupa program air bersih berupa pembangunan bak penampungan air, pembangunan jalan ke kantong kantong produksi dan Kegiatan peningkatan ekonomi kelompok yang difasilitasi oleh komponen B.

### **Manajemen dan Pemantauan**

Komponen kegiatan ini meliputi kegiatan dukungan administrasi, bantuan teknis, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan proyek secara keseluruhan. Kebijakan publik yang ideal menurut Nugroho (2003: 263) haruslah kontekstual atau mengacu kepada tantangan yang dihadapi pada saat ini dan di masa depan. Kebijakan harus mengandung unsur pragmatisme, yakni bahwa setiap tindakan harus mengacu pada suatu tujuan. Pragmatisme harus bersifat etis dan strategis. Bersifat etis artinya sifat pragmatis ditujukan untuk kebijakan publik dan bukan elit. Bukan sekelompok atau segolongan orang saja. Selanjutnya Nugroho (2003: 265) memahami bahwa kebijakan pemberdayaan rakyat adalah kebijakan yang mempunyai kualitas etis tertinggi. Kebijakan yang memberdayakan rakyat adalah kebijakan pragmatis, selain etis juga bersifat strategis.

Idealnya suatu kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan desa seharusnya dirancang berdasarkan karakteristik desa penerima manfaat, dengan menggali nilai-nilai yang ada di desa tersebut. Dengan begitu masyarakat akan lebih mudah memahami dan melaksanakan kegiatan yang ditujukan untuk pemberdayaan mereka sebagai masyarakat desa.

### **Target Group**

*Target Group* merupakan sasaran kebijakan, yakni individu, sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima kebijakan atau menjadi pihak yang merasakan adanya kebijakan.

Melihat pelaksanaan proyek PMPD di lokasi penelitian keterlibatan perempuan lebih banyak terlihat aktif pada kegiatan LSPBM. Hal ini dapat dilihat dari kepengurusan LSPBM, pertemuan rutin LSPBM, jumlah anggota perempuan LSPBM, dan adanya peningkatan usaha pada beberapa anggota LSPBM perempuan. Namun demikian belum semua dari warga masyarakat di Lokasi Penelitian, dan khususnya perempuan miskin terjaring dalam pembinaan kelompok usaha potensial dan belum terakses ke LSPBM. Masih banyak dari perempuan miskin yang belum mengetahui perihal pembentukan dan pembinaan kelompok usaha potensial. Hal ini antara lain disebabkan kurangnya sosialisasi akan pentingnya serta pembentukan usaha kelompok hanya berdasarkan tempat tinggal, dan bukan berdasarkan jenis usaha.

Komunikasi memiliki peran penting bagi diterimanya kebijakan oleh masyarakat, sebab dengan adanya komunikasi yang baik dari implementor maka akan terjalin suatu hubungan yang harmonis antara implementor dengan masyarakat, bila hal tersebut dapat dibangun maka implementasi kebijakan PMPD akan berjalan dengan baik, namun jika komunikasi yang dilakukan mengalami hal yang tidak diharapkan, maka akan berdampak pada proses implementasi kebijakan PMPD itu sendiri. Komunikasi dikatakan efektif jika makna di antara sumber dan penerimanya sama dengan satu tujuan dan tujuan dari pihak-pihak yang berkomunikasi terpenuhi dalam proses komunikasi. Dengan demikian, komunikasi yang dilakukan dengan baik akan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan program PMPD.

### **Implementing Organization**

*Implementing Organization* yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini penting untuk dipahami bahwa organisasi itu sendiri memiliki dampak pada proses implementasi kebijakan. Organisasi diperlukan agar kebijakan dapat dilaksanakan. Dalam mencapai tujuan tersebut ditopang dengan adanya sumber daya yang terdapat dalam organisasi (Widodo, 2008:89). Organisasi Proyek PMPD mencakup pelaku-pelaku dari unsur pemerintah pusat, pemerintah Propinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, masyarakat, serta bantuan teknis.

### **Environmental Factor**

Pada tataran komponen lingkungan, bahwa implementasi program PMPD di Desa Kalawara seharusnya memperhatikan karakteristik masyarakat Desa Kalawara, yaitu sebagai komunitas primordial yaitu suatu ikatan atas dasar persamaan ciri-ciri sosial yang mendasar dan sulit untuk dirubah seperti kesamaan agama, ras kesukuan (daerah asal).

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa masyarakat Desa Kalawara maupun Kelurahan Mapane maupun Kelurahan Tokorondo sesungguhnya mempunyai sumberdaya yang baik untuk bisa dikembangkan baik itu berupa sumber daya manusia sumber daya alam maupun modal sosial yang ada di masyarakat. Peran agama merupakan faktor paling menonjol dibalik keberdayaan masyarakat alam konteks ini peran agama besar sebagai variabel motivasional pembentukan etika ekonomi dan etika bermasyarakat.

## **KESIMPULAN**

Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Perempuan Miskin Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso Prvovinsi Sulawesi Tengah) belum berhasil dalam memberdayakan

perempuan miskin perdesaan. Faktor utama penyebab adalah beban kerja lebih pada perempuan yang mengakibatkan ketimpangan gender. Oleh karena itu sangat penting mengakomodasi cara solusi masalah ketimpangan gender tersebut dalam penentuan kebijakan program penanggulangan kemiskinan. Wacana kemiskinan tidak dapat meniadakan masalah perbedaan pengalaman laki-laki dan perempuan dalam melepaskan diri dari belenggu kemiskinan, karena perempuan pada umumnya miskin atau tidak miskin sejak awal berangkat dari “modal” (pendidikan, akses ekonomi dan lain-lain) yang berbeda dari laki-laki. Dalam mengimplementasi program dengan akomodasi ketimpangan gender dan yang terpenting juga adalah bagaimana sosialisasi kesetaraan gender itu tampak perlu dengan mendudukkan perempuan dan laki-laki secara bersama dengan tetap memperhatikan nilai-nilai local seperti dengan adanya yaperTEMUAN-pertemuan yang intens melalui kegiatan agama yang rutin dilaksanakan.

Pada dasarnya bahwa implementasi program pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan desa dalam memberdayakan perempuan miskin tidak hanya bergantung pada empat komponen (kebijakan yang ideal, organisasi pelaksana, kelompok sasaran dan lingkungan) saja, tetapi harus memperhatikan faktor komunikasi, karena komunikasi akan menentukan keberlanjutan dan keberhasilan implementasi kebijakan.

## REFERENSI

- Adimihardja, Kusnaka, 2018, *Dinamika Budaya Lokal*, Bandung: Pusat Kajian LBPB
- Ahmadi, Widodo. 2008. Psikologi Belajar. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Brown, James W., (1983). AV Instruction: Technology, Media, and Methods (6th edition). New York. McGraw-Hill Inc., library of Congress Cataloging in Publication Data
- Eaton Josep W., 2016 , *Institution Building and Development : from concepts to application*, terjemahan Sri Edi Swasono, Jakarta: UI Press
- Effendy, Tenas, 2014, *Tunjuk Ajar Melayu, Butir-butir Budaya Melayu Riau*, Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu
- Grindle, 2017, *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries*, Boston: Harvard University Press
- Neo, Boon Siong dan Geraldine Chen, 2017, *Dynamic Governance, Embedding Culture, Capabilities and Change In Singapore*, Singapore: World Scientific.
- Nugroho, Riant, 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT Elek Media Kompotindo
- Sayogyo, 1982. “Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan, Dalam Mencari Bentuk Ekonomi Indonesia”, Gramedia, Jakarta.
- Siregar, 2006, “Perbaikan Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi : Mendorong Investasi dan Menciptakan Lapangan Kerja”, Jurnal Ekonomi Politik dan Keuangan, INDEF, Jakarta.
- Yudhoyono. S, B dan Harniati, 2004, “Pengurangan Kemiskinan di Indonesia : Mengapa Tidak Cukup Dengan Pertumbuhan Ekonomi” ?, Brighten Press, Bogor
- Yuliati, Yayuk dan Mangku Poernomo. 2003. Sosiologi Pedesaan. Jakarta: Lapera
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 World Bank. (2005). Kajian Pengeluaran Publik Indonesia: Memaksimalkan Peluang Baru. The World Bank Office Jakarta.